

BAB I

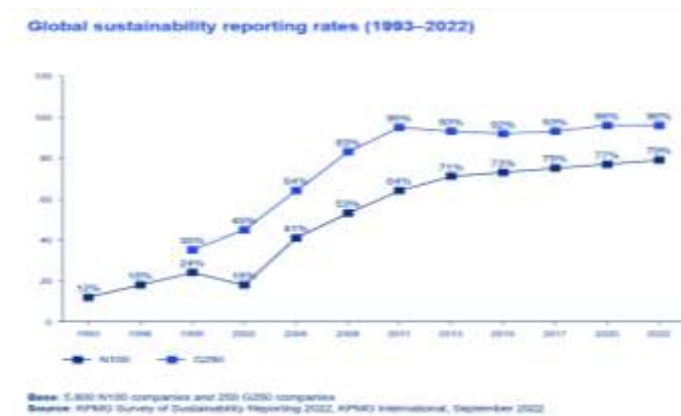
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keberlanjutan kini diyakini sebagai komponen integral dalam praktik pelaporan korporasi modern, terutama di sektor energi yang berkontribusi besar sebagai penyumbang emisi karbon global dan berbagai tantangan lingkungan (Adamo et al., 2025). Kesadaran global terhadap keberlanjutan telah mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagaimana diatur dalam GRI Standards (2021), pelaporan ini mencakup pengungkapan informasi mengenai implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas operasional industri dengan kontribusi signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi para *stakeholder* (Luque-Vilchez et al., 2023). Korporasi tidak sekedar berorientasi pada perolehan laba, melainkan juga mempunyai tanggung jawab atas dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan dan masyarakat. *Sustainability reporting* dapat berfungsi sebagai sarana utama untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan (Suhartini et al., 2024).

Tren global menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam adopsi *sustainability reporting* sejak 1993 hingga 2022. Data KPMG (2022) memperlihatkan bahwa tingkat adopsi pelaporan keberlanjutan pada perusahaan dalam kelompok Global 250 meningkat dari 12% pada 1993 menjadi 96% pada 2022, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak selalu linear. Tren ini menunjukkan

bahwa *sustainability reporting* telah menjadi praktik yang semakin umum, namun kenaikan jumlah pelaporan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas informasi yang disajikan (Sebrina et al., 2023). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengukuran *Sustainability Reporting Quality* (SRQ) untuk menilai sejauh mana laporan tersebut informatif, lengkap, dan mencerminkan transparansi perusahaan terhadap kinerja lingkungan dan sosialnya (Elaigwu et al., 2022).



Gambar 1.1 Data Tingkat Pelaporan Keberlanjutan Global Menurut Survei KPMG

Sumber: Survei KPMG 2022

Di Indonesia, regulasi terkait pengungkapan keberlanjutan diperkuat melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 yang mewajibkan emiten dan lembaga keuangan melaporkan keberlanjutan secara periodik. Praktik pelaporan keberlanjutan semakin diadopsi oleh entitas bisnis, akan tetapi mutu serta keluasan informasi yang diungkapkan belum sepenuhnya seragam (Dewi et al., 2023).

Fenomena tersebut tampak jelas pada sektor energi di Indonesia, yang memiliki eksposur lingkungan tinggi dan kerap menjadi sorotan publik terkait keterbukaan informasi kinerja lingkungan (Friske et al., 2023). Kompleksitas operasional dan eksposur lingkungan yang tinggi menuntut perusahaan di sektor ini untuk tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memastikan kredibilitas isi dari laporan yang diterbitkan (He et al., 2025). Merujuk pada penelaahan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan energi di BEI untuk periode 2022 – 2024, tingkat kualitas pelaporan keberlanjutan antar perusahaan pada sektor energi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian perusahaan telah mencapai tingkat pengungkapan yang komprehensif dan transparan, sedangkan sebagian lainnya masih terbatas pada pelaporan bersifat formal dan administratif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah laporan keberlanjutan di Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas informasi yang disajikan di dalamnya (Dewi et al., 2023).



Gambar 1.2 Variasi *Sustainability Reporting Quality (SRQ)* Perusahaan Energi di BEI

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Mengacu pada grafik Gambar 1.2, terlihat bahwa rata-rata kualitas pelaporan keberlanjutan antarperusahaan energi menunjukkan variasi yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan berada pada kategori skor 3 (*Moderate*). Skor ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah menyusun laporan keberlanjutan secara terpisah dan mengungkapkan tiga pilar ESG beserta data kuantitatif, namun belum memiliki komite *oversight* yang secara khusus memantau isu keberlanjutan, serta belum melibatkan pihak independen untuk memberikan verifikasi atas laporan tersebut (Oyerogba et al., 2024). Dominasi skor ini menggambarkan bahwa kualitas pelaporan keberlanjutan pada sebagian besar perusahaan masih berada pada tingkat dasar dan belum didukung oleh tata kelola yang memadai untuk memastikan kredibilitas informasi.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil perusahaan yang berhasil mencapai skor 6 (*Excellent*). Perusahaan dalam kategori ini telah memenuhi standar pelaporan yang lebih tinggi, mencakup penyusunan *sustainability report* terpisah, pengungkapan yang komprehensif atas ketiga pilar ESG, penyediaan indikator kuantitatif yang relevan, keberadaan komite *oversight*, serta pelibatan pihak eksternal melalui *external assurance* oleh kantor akuntan publik (Oyerogba et al., 2024). Jumlah perusahaan yang sangat terbatas pada kategori tertinggi ini menunjukkan bahwa praktik pelaporan dengan kualitas unggul masih belum menjadi praktik umum di sektor energi.

Selain perbedaan skor tersebut, data juga menunjukkan bahwa dari 96 perusahaan energi yang terdaftar di BEI, sebanyak 45 perusahaan tidak mempublikasikan *Sustainability Report* terpisah, baik dari *Annual Report* maupun *Integrated Reporting*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hampir setengah dari populasi perusahaan belum mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan sebagai dokumen mandiri, meskipun tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Secara keseluruhan, dominasi skor yang relatif rendah, keterbatasan perusahaan yang mencapai kategori *Excellent*, serta tingginya proporsi perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan terpisah menegaskan adanya kesenjangan pelaporan (*reporting gap*) dalam sektor energi di Indonesia.

Perbedaan kualitas pelaporan keberlanjutan yang tergambar pada sektor energi tidak terjadi secara acak, melainkan mencerminkan pengaruh berbagai faktor internal perusahaan (Sebrina et al., 2023). Beberapa faktor utama yang berperan di antaranya meliputi penerapan akuntansi hijau, serta efektivitas tata kelola perusahaan yang baik (Rahmawati et al. 2025). *Green accounting* memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan *Sustainability Reporting Quality* (SRQ) melalui penyediaan laporan yang sistematis mengenai aktivitas dan biaya lingkungan perusahaan. Penerapan *green accounting* mendorong praktik pelaporan keuangan yang turut mempertimbangkan dimensi lingkungan guna menghasilkan informasi yang lebih relevan dan berkelanjutan (Hamidah et al. 2025).

Good corporate governance (GCG) berperan menyediakan kerangka pengawasan untuk memastikan proses penyusunan serta penyajian laporan

keberlanjutan dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparan, serta terhindar dari konflik kepentingan (Ludwig et al. 2022). Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif mendorong peningkatan akuntabilitas dan konsistensi informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keberlanjutan, baik dari sisi kelengkapan pengungkapan maupun keandalan informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Green accounting (GA) sering dianggap mampu memperbaiki kinerja lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Temuan Rahmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa GA berkorelasi positif pada SRQ melalui praktik pelaporan biaya lingkungan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dhar et al. (2022). juga membuktikan bahwa implementasi GA memperkuat kemampuan perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan karena kualitas informasi sosial dan lingkungan yang lebih baik mendorong keandalan pelaporan.

Namun berbagai penelitian lain menunjukkan hasil yang berlawanan. Melenia et al. (2023) menemukan bahwa penerapan *renewable energy* sebagai bagian dari GA menurunkan kinerja lingkungan. Lukito et al. (2025) bahkan menemukan dampak negatif GA terhadap *sustainable development* akibat beban biaya dan potensi *greenwashing*. Ketidakkonsistenan temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas *Green Accounting* tidak hanya tergantung pada eksistensi biaya lingkungan, namun juga pada mutu implementasi serta integrasinya ke dalam

sistem pelaporan. Variasi hasil tersebut mengindikasikan perlunya menilai kembali peran *green accounting* sebagai penentu kualitas laporan keberlanjutan, khususnya terkait sejauh mana pengungkapan biaya lingkungan benar-benar mencerminkan komitmen keberlanjutan.

Peran *Good Corporate Governance* (GCG) turut muncul sebagai penentu penting dalam pelaporan berkelanjutan. Penelitian Oyerogba et al. (2024) menunjukkan bahwa *board independence*, *audit committee expertise*, serta *oversight* yang kuat mendorong peningkatan SRQ. Kateb et al. (2025) juga menemukan bahwa keahlian dan kehadiran dewan serta keberadaan *CSR committee* memperkuat kualitas CSR dan *sustainability reporting*. Penelitian Rahmawati et al. (2025) memperkuat temuan tersebut melalui bukti bahwa *GCG disclosure* berdampak positif pada SRQ baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan berbeda muncul pada berbagai penelitian lain. Wahyuningrum et al. (2025) membuktikan bahwa *board independence* justru memberikan pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap pencapaian kinerja lingkungan. Lukito et al. (2025) bahkan menemukan bahwa *audit committee* dapat berdampak negatif terhadap *sustainable development* karena fokus yang terlalu finansial dan rendahnya kompetensi keberlanjutan. Variasi ini mengisyaratkan bahwa mekanisme GCG tidak selalu mampu meningkatkan kualitas pelaporan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi penelitian yang menilai kembali peran GCG dalam meningkatkan SRQ pada perusahaan energi, terutama karena kualitas *governance* sering menjadi landasan kredibilitas pelaporan non-keuangan.

Merujuk pada temuan di penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *green accounting*, dan *good corporate governance* tidak hanya berkorelasi positif pada kualitas pelaporan keberlanjutan, namun terdapat pula temuan yang menegaskan bahwa implikasi masing-masing variabel terhadap kinerja non-keuangan maupun kualitas laporan tidak selalu signifikan atau bahkan bersifat negatif. Ketidaksejajaran hasil ini menandakan adanya inkonsistensi empiris yang masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dengan menyoroti perusahaan energi yang terdaftar di BEI. Variasi pengungkapan keberlanjutan dapat dijelaskan berdasarkan teori legitimasi, yang menekankan penggunaan strategi simbolis untuk mempertahankan penerimaan sosial ketika kinerja aktual belum sesuai ekspektasi (Zharfpeykan, 2021). Perspektif teori stakeholder turut menjelaskan bahwa sifat dan intensitas pengungkapan sangat dipengaruhi oleh tingkat tekanan serta perhatian dari kelompok pemangku kepentingan yang dianggap paling relevan (Abeysekera, 2022).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa penerapan *green accounting* mencerminkan upaya perusahaan dalam menyelaraskan praktik operasionalnya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku guna menjaga penerimaan publik. Penyesuaian tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih memadai, sehingga memperkuat legitimasi keberlanjutan sebagaimana dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan (Fernando et al., 2024). Penjelasan ini juga dipertegas oleh teori stakeholder, yang menekankan bahwa transparansi terkait biaya lingkungan mencerminkan keseriusan perusahaan

dalam memenuhi harapan publik terhadap pengelolaan dampak ekologis (Gola et al., 2022).

Good Corporate Governance (GCG) dapat dipahami melalui perspektif teori stakeholder pentingnya mekanisme pengawasan independen, seperti peran komisaris dan komite audit dalam melindungi kepentingan investor, regulator, masyarakat, dan komunitas lingkungan (Suhartini et al., 2024). Teori legitimasi menjelaskan bahwa tata kelola yang kuat juga menunjukkan kesesuaian operasional perusahaan dengan nilai dan norma masyarakat sekaligus menjaga legitimasi publik melalui pelaporan keberlanjutan yang kredibel (Nicolo et al., 2023). Meskipun teori legitimasi dan *stakeholder* memberikan penjelasan konseptual atas variasi pengungkapan, kedua teori tersebut belum mampu menghasilkan prediksi yang konsisten pada konteks sektor energi Indonesia. Ketidaksesuaian antara prediksi teori dan temuan empiris sebelumnya mencerminkan adanya *theoretical gap* yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Keterbatasan prediksi teoritis tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi sektor energi Indonesia yang menghadapi tekanan lingkungan signifikan. Sektor ini tercatat selaku kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu sebesar 55,30% dari total emisi nasional pada tahun 2023. Sementara itu, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menyumbang 22,56%, sehingga secara bersama-sama kedua sektor tersebut berkontribusi lebih dari 78% terhadap total emisi nasional (KLHK, 2024). Dominasi energi fosil yang hampir mencapai 90% dari bauran energi primer nasional pada 2022 memperkuat

peningkatan emisi sektor energi dan transportasi sebesar 1 Giga Ton CO₂e, yang diproyeksikan meningkat hingga 1,4 Giga Ton CO₂e pada 2030 (BAPPENAS, 2024). Sebagai tindak lanjut, pengungkapan emisi karbon menjadi bagian dari dedikasi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target *net-zero emissions* pada tahun 2060 (Kementerian ESDM, 2025).

Peningkatan tekanan lingkungan belum selalu diikuti oleh kualitas pelaporan keberlanjutan yang konsisten (Nguyen et al., 2025). Variasi kualitas pengungkapan menunjukkan bahwa keberadaan praktik akuntansi hijau dan tata kelola yang baik belum tentu menghasilkan laporan keberlanjutan yang kredibel jika tidak disertai pengungkapan emisi karbon yang memadai. *Carbon Emission Disclosure* (CED) bertindak sebagai sinyal konkret yang menunjukkan sejauh mana biaya lingkungan dan pengawasan tata kelola terintegrasi dalam strategi keberlanjutan, sekaligus mencegah persepsi simbolis (Setiawan et al., 2025). Oleh karena itu, CED dipandang berpartisipasi dalam memperkuat hubungan antara *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Sustainability Reporting Quality*, karena berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sekaligus respons terhadap tuntutan transparansi dari para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, kajian sebelumnya masih cenderung berfokus pada hubungan langsung antara praktik tata kelola atau pengungkapan lingkungan dengan kinerja finansial, sehingga belum memberikan gambaran jelas mengenai determinan kualitas *sustainability reporting* (SRQ) sebagai indikator kinerja non-keuangan yang lebih relevan bagi pemangku kepentingan. Periode 2022–2024 menjadi fase

transisi penting dalam praktik pelaporan keberlanjutan, ditandai oleh pembaruan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021* yang menekankan prinsip materialitas ganda serta transparansi lintas sektor (Czaja-Cieszyńska et al. 2023). Secara nasional, Indonesia memperkuat regulasi melalui SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 yang menetapkan pedoman penyusunan laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, mendorong integrasi unsur ESG ke dalam laporan perusahaan sebagai langkah awal menuju keselarasan dengan standar internasional.

Melihat urgensi dan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan kontribusi baru dengan menggunakan pengukuran *sustainability reporting quality* yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu seperti Kateb et al. (2025). Berbeda dari pendekatan pada penelitian Kateb et al., (2025) yang menilai SRQ hanya dengan mengukur keberadaan pengungkapan dan *assurance* saja, penelitian ini menerapkan pengukuran SRQ dengan skala penilaian 0–6 yang mencakup kelengkapan tiga pilar ESG, penyediaan data kuantitatif, keberadaan komite pengawasan, serta tingkat *assurance* oleh pihak independen non-audit maupun audit firm. Hal ini memungkinkan evaluasi lebih tajam terhadap kedalaman, kualitas narasi, keterukuran indikator lingkungan, dan transparansi pengungkapan.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam model empiris yang dibangun. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada hubungan parsial antara tata kelola perusahaan dan SRQ (Oyerogba et al., 2024). Beberapa penelitian lainnya seperti Rahmawati et al. (2025) hanya mengombinasikan variabel *good*

corporate governance (GCG) dan *green accounting* (GA) terhadap *sustainability reporting* (SR) secara umum, sehingga masih berfokus pada intensitas atau keberadaan pengungkapan, bukan pada kualitas substansi laporan. Penelitian ini mengembangkan celah tersebut dengan menempatkan GCG, dan GA secara simultan sebagai variabel independen yang memengaruhi *sustainability reporting quality*, sekaligus menambahkan *Carbon Emission Disclosure* (CED) sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kedua praktik tersebut terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Situasi tersebut menciptakan *research gap* yakni ketiadaan kajian yang menganalisis secara simultan pengaruh GCG dan GA terhadap kualitas laporan keberlanjutan dengan mempertimbangkan peran CED sebagai variabel moderasi. Penelitian terdahulu lebih menekankan keberadaan atau intensitas pengungkapan (*sustainability reporting*) dan belum mengevaluasi kualitas substantifnya, sehingga muncul celah empiris. Secara konseptual, belum tersedia kerangka yang menjelaskan secara rinci kontribusi GCG dan GA terhadap SRQ dengan peran CED sebagai moderasi, sehingga penelitian ini juga menutup *theoretical gap*. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji pengaruh GA dan GCG terhadap SRQ sekaligus menilai peran moderasi CED pada perusahaan energi, sektor yang sangat bergantung pada transparansi emisi dan akuntabilitas lingkungan.

Hal ini semakin menarik untuk diteliti karena peran *green accounting* dan *good corporate governance* menjadi determinan penting dalam peningkatan kualitas *sustainability reporting*, sementara *Carbon Emission Disclosure* (CED)

memoderasi pengaruh keduanya sehingga turut menentukan peningkatan kredibilitas dan substansi laporan keberlanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI pada periode 2022–2024, mengingat tingginya intensitas emisi dan tekanan regulasi di sektor tersebut. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* memengaruhi *Sustainability Reporting Quality (SRQ)* secara simultan, dengan CED sebagai variabel moderasi, sebagaimana difokuskan dalam penelitian berjudul **“Determinasi *Sustainability Reporting Quality* pada Sektor Energi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang penelitian menjadi dasar perumusan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Apakah *Green Accounting* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Quality*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Quality*?
3. Apakah *Carbon Emission Disclosure* dapat memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap *Sustainability Reporting Quality*?
4. Apakah *Carbon Emission Disclosure* dapat memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Sustainability Reporting Quality*?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan yang telah telah diidentifikasi menjadi dasar penetapan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji serta menganalisa pengaruh *Green Accounting* pada *Sustainability Reporting Quality* pada sektor energi periode 2022–2024.
2. Menguji serta menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* pada *Sustainability Reporting Quality* (SRQ) pada sektor energi periode 2022–2024.
3. Menguji serta menganalisa peran *Carbon Emission Disclosure* dalam memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap *Sustainability Reporting Quality* pada sektor energi di BEI periode 2022–2024.
4. Menguji serta menganalisa peran *Carbon Emission Disclosure* dalam memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Sustainability Reporting Quality* pada sektor energi di BEI periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menghasilkan manfaat yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diupayakan untuk berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis di bidang akuntansi keberlanjutan, terutama mengenai pengaruh penerapan akuntansi hijau, dan *GCG* terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan yang di moderasi oleh pengungkapan emisi karbon.

- b) Hasil penelitian ini juga memperkuat penerapan teori stakeholder dan teori legitimasi dalam konteks pelaporan keberlanjutan, dengan menunjukkan bagaimana perusahaan berupaya memperoleh legitimasi publik dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan melalui praktik pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terverifikasi.
- c) Penelitian ini diharapkan menginspirasi penelitian lanjutan yang berkeinginan untuk mengembangkan model serupa dengan menambahkan variabel baru, memperluas cakupan sektor, atau menggunakan pendekatan metodologis berbeda untuk menguji konsistensi temuan empiris di konteks yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi investor, regulator, dan pihak eksternal lainnya, temuan penelitian ini dapat menyediakan informasi yang lebih komprehensif guna menilai komitmen keberlanjutan perusahaan serta efektivitas pengungkapan emisi karbon dan praktik tata kelola yang dijalankan.
- b) Penelitian ini juga berpotensi sebagai referensi untuk lembaga pengawas dan pengatur pasar modal dalam merumuskan kebijakan yang menguatkan praktik pelaporan keberlanjutan menjadi lebih transparan serta mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan perusahaan yang efektif.